

Pengaruh Pendapatan, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

Delta Susanti, Melti Roza Adry, Mike Triani

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Barat Padang Telp. 445089 Fax. (0751) 447366,
e-mail. info@fe.unp.ac.id

Abstract: *This research purpose to analysis the effect of (1) income, (2) the population, (3) the area of expenditure of local government in West Sumatra. This type of research includes descriptive and inductive. This study uses BPS data 2010-2016 with data analysis method using panel regression (Pooled Analysis) and classical assumption test with stages (1) Multicollinearity test, (2) Heteroscedasticitytest. The results of this study indicate that negative income has a significant effect on government spending. Negative population is not significant to local government spending. And then, the last variable the size of the area has a significant negative effect on the expenditure of the local government in accordance with the research of Nazara and Nurkholis.*

Keywords: *Income (GDP at current prices), Total Population, total area.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh (1) pendapatan, (2) jumlah penduduk, (3) luas wilayah terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Sumatera Barat. Jenis penelitian ini termasuk deskriptif dan induktif. Penelitian ini menggunakan data BPS tahun 2010-2016 dengan metode analisis data menggunakan analisis model regresi panel (Pooled Analysis) dan uji asumsi klasik dengan tahapan (1) Uji Multikolinearitas, (2) Uji Heteroskedastisitas. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan negatif berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah. Jumlah penduduk negatif signifikan terhadap pengeluaran pemerintah daerah. Luas wilayah berpengaruh negatif signifikan terhadap pengeluaran pemerintah daerah hal ini sesuai dengan penelitian Nazara dan Nurkholis.*

Kata kunci: *Pendapatan (PDRB atas dasar harga berlaku), Jumlah Penduduk, luas wilayah.*

Besarnya campur tangan pemerintah di dalam perekonomian Indonesia dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kondisi ini sangat erat hubungannya dengan sistem ekonomi Indonesia yang bersifat sosialis. Untuk itu diwajibkan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap melalui program pelita. Pemerintah dapat melakukan dua jenis kebijakan yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter terkait mengenai kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Sedangkan kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif, pemerintah dengan instrumen kebijakannya mampu menyelamatkan perekonomian suatu negara dari keadaan resesi ekonomi (Sri danawati,dkk 2016).

Nurkholis (2007) menyebutkan bahwa terdapat hubungan signifikan negatif antara pengeluaran pemerintah perkapita dan jumlah penduduk dan luas wilayah signifikan negatif terhadap pengeluaran pemerintah perkapita. Margaretha (2014) menyebutkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah.

Sebagian besar belanja pemerintah daerah kabupaten kota lebih banyak terserap untuk kebutuhan belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung yang bersifat rutin. Pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan dana sebesar 9.432 milyar rupiah untuk belanja daerah. Pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan dana sebesar 10.633 milyar rupiah. Dan untuk tahun 2012 pemerintah mengeluarkan dana sebesar 11.944 milyar rupiah dan untuk tahun 2013 sebesar 13.822 milyar rupiah untuk belanja daerah. Sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 15.194 milyar rupiah dan tahun 2015 pemerintah kabupaten/kota mengeluarkan dana sebesar 17.249 milyar rupiah untuk belanja daerah, dengan realisasi sebesar 56,64% untuk belanja tidak langsung dan 43,36% untuk untuk belanja langsung (BPS Sumbar).

Realisasi pengeluaran pemerintah provinsi Sumatera Barat menurut komponen pengeluaran yang tertinggi adalah di tahun 2015 dimana kegiatan pemerintahan ditahun tersebut mengalami peningkatan yang cukup tinggi tercermin dari total pengeluaran sebesar 4.075 milyar rupiah. Berbanding jauh dengan pengeluaran pemerintah di tahun-tahun sebelumnya seperti di tahun 2011 sebesar 2.400 milyar rupiah. Dilihat dari persentase pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan nilai 36,8% dimana pada tahun sebelumnya realisasi pengeluaran pemerintah di Sumatera mengalami penurunan sebesar 7,5% (BPS,Sumbar).

Selanjutnya untuk PDRB sebagai faktor yang menjadi patokan atau acuan pengeluaran pemerintah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana peningkatan yang tertinggi berada pada tahun 2011 yaitu sebesar 11,4%, begitupun dengan jumlah penduduk yang setiap tahun selalu meningkat dengan stabil berkisar antara 1,3%-1,4%. Terakhir faktor yang juga mempengaruhi pengeluaran pemerintah yaitu luas wilayah. luas wilayah tentunya sangat jarang sekali adanya perubahan terlihat dari data diatas luas wilayah kabupaten dan kota dari tahun ke tahun selalu menunjukkan angka yang stabil yaitu 42297.3 km², akan tetapi untuk daerah yang ingin melakukan kebijakan desentralisasi tentunya luas wilayah menjadi faktor yang juga akan berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah.

Hal ini menunjukkan ada permasalahan yang menarik untuk diteliti karena persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan yang tinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 36,8% tetapi dari persentase PDRB pada tahun 2012 mengalami penurunan yaitu sebesar 9,3% sementara persentase jumlah penduduk pada tahun 2011 yaitu 11,4%. Dilihat dari persentase pertumbuhan pengeluaran terdapat fenomena bahwa adanya ketidakstabilan pertumbuhan pengeluaran pemerintah sementara PDRB meningkat dari tahun ke tahun walaupun persentase pertumbuhan PDRB tidak stabil. Hal ini bertolak belakang dengan teori Wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat.

Untuk dapat menjawab berbagai permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “*Pengaruh Pendapatan, Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Sumatera Barat*” sebagai judul atas penelitian yang akan dilakukan.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Pengeluaran Pemerintah

Anggaran belanja pemerintah memiliki dua fungsi ekonomi utama yaitu sebagai sebuah alat yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatur prioritas nasional, mengalokasikan output nasional di antara konsumsi umum, pribadi dan investasi (Mangkoesoebroto 2001).

Pengeluaran pemerintah mempunyai arti riil dimana dapat digunakan sebagai indikator setiap kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang harus dikeluarkan.

Teori Rostow

Teori ini melihat hubungan antara perkembangan pengeluaran pemerintah yang dibagi atas tiga tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, menengah dan tahap lanjut. Perkembangan ekonomi pada tahap awal, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

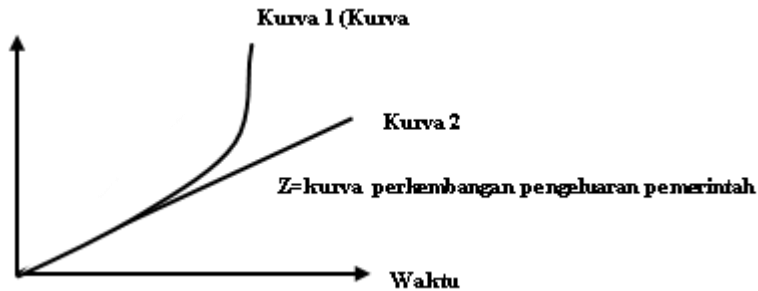
Teori Adolf Wagner

Dalam teorinya Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Pada suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat terutama disebabkan oleh pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah maka akan memberikan efek terhadap pertahanan dan keamanan, kesejahteraan dan pembangunan. Berikut merupakan formulasi hukum wagner:

$$\frac{PP_n P}{PPK_1} < \frac{P_k PP_n}{PPK_2} < \dots < \frac{P_k PP_n}{PPK_n} \quad (1)$$

PPkP merupakan pengeluaran pemerintah perkapita, PPK merupakan pendapatan perkapita, yaitu GDP atau jumlah penduduk, 1,2...n adalah jangka waktu (tahun).



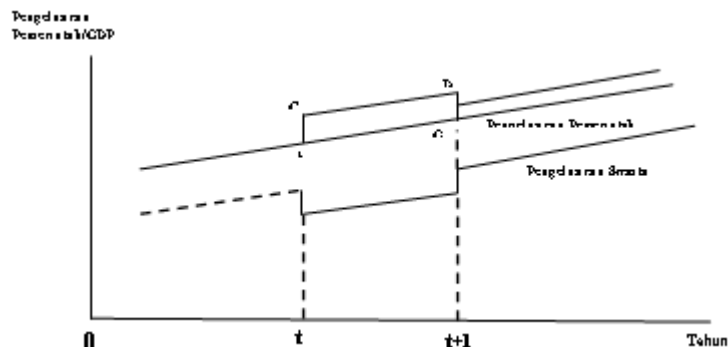
Grafik 1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner

Sumber : Buku Ekonomi Publik edisi 3, Guritni Mangkoesobroto 2001

Teori Wagner ini lebih menitikberatkan kepada pemerintah sebagai individu yang bebas untuk bertindak dan terlepas terhadap masyarakat lain. Kurva ini menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat.

Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman berpendapat bahwa masyarakat memiliki suatu tingkat toleransi pajak, yaitu dimana masyarakat dapat mengetahui besaran pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah. Masyarakat akan lebih menyadari bahwa pemerintah memerlukan dana untuk pembiayaan kegiatan pemerintah sehingga masyarakat lebih sadar untuk membayar pajak.

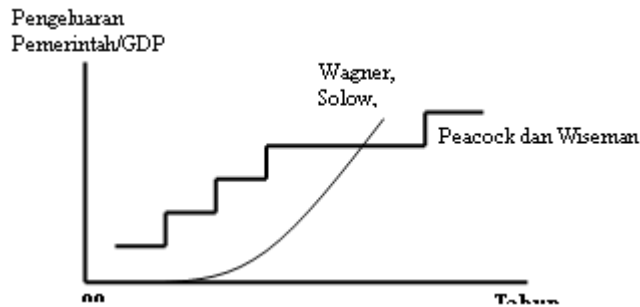


Grafik 2 perkembangan pengeluaran pemerintah menurut Peacock dan Wiseman

Sumber : Buku Ekonomi Publik edisi 3, Guritno Mangkoesobroto 2001

Dalam keadaan normal, t ke t+1, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP mengalami peningkatan sebagaimana yang ditunjukkan

garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang sehingga pada tahap ini pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan selanjutnya meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD . Kemudian setelah perang berakhir pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak mengalami penurunan ke G . Hal ini dikarenakan setelah perang, pemerintah membutuhkan biaya tambahan untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan.



Grafik 3 Perbedaan Wagner, Solow, Peacock dan Wiseman

Sumber : Buku Ekonomi Publik Edisi 3, Guritno Mangkoesobroto 2001

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave dilukiskan dalam bentuk kurva eksponensial, kemudian teori Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Ini disebabkan adanya kendala pada toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, untuk itu pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari lembaga resmi Badan Pusat Statistik (BPS) data bersifat panel dari tahun 2010-2016.

Analisis Pooled Least Square (PLS)

Pooled Least Square (PLS) biasanya digunakan untuk menganalisis hubungan sistem variabel-variabel kombinasi antara data silang (*cross section*) dengan runtutan waktu (*time series*), yaitu jumlah variabel diobservasi atas jumlah kategori dan dikumpulkan dalam suatu jangka waktu tertentu. Adapun bentuk persamaan ataupun model regresi panel dapat dibentuk pada persamaan umum. Model yang digunakan dalam analisis data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + U_{it} \quad (2)$$

Dimana :

Y_{it} = Pengeluaran pemerintah daerah

X_{it} = Pendapatan

X_{2it} = Jumlah penduduk
 X_{3it} = Luas wilayah
 U_{it} = *Error term*
I atau *n* = *Cross-section*
t = *Time Series*

Hasil Pengujian persamaan dengan menggunakan aplikasi eviews 8 dapat terlihat dari bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebagai berikut:

Tabel 1
Uji heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.635450	2.960874	0.890092	0.3752
LOG(X1)	-0.111491	0.254258	-0.438498	0.6618
LOG(X2)	-0.071650	0.095330	-0.751594	0.4538
LOG(X3)	0.045770	0.049685	0.921208	0.3588
R-squared	0.017567	Mean dependent var		0.918806
Adjusted R-squared	-0.007200	S.D. dependent var		0.673633
S.E. of regression	0.676054	Akaike info criterion		2.086893
Sum squared resid	54.38886	Schwarz criterion		2.178346
Log likelihood	-124.3439	Hannan-Quinn criter.		2.124041
F-statistic	0.709297	Durbin-Watson stat		1.675783
Prob(F-statistic)	0.548298			

Untuk mengidentifikasi heterokedastisitas dengan hasil analisis adalah probabilitas F Statistik (0.548298) > 0,05 % selain itu probabilitas variabel bebas > 0,05 hasil regresi dapat digunakan karena tidak terdapat masalah heterokedastisitas pada masing-masing variabel. Karena nilai probabilitas masing-masing variabel yaitu sebesar X1 (0.6618), X2 (0.4538) dan X3 (0.3588).

Tabel 2
Uji Multikolinieritas

	LOG(X1)	LOG(X2)	LOG(X3)
LOG(X1)	1.000000	-0.419291	-0.623560
LOG(X2)	-0.419291	1.000000	0.631855
LOG(X3)	-0.623560	0.631855	1.000000

Diketahui bahwa tidak adanya masalah multikolinieritas dalam model persamaan regresi penelitian. Hal ini dikarenakan nilai matriks korelasi (*correlation matrix*) dari semua variabel bebas lebih kecil dari 0,8 yaitu antara X_1

dengan X_2 (-0.419291), X_1 dengan X_3 (-0.623560) dan X_2 dengan X_3 (0.631855) sehingga peneliti ini dapat dilanjutkan karena hasil estimasi bersifat BLUE.

Tabel 3
Hasil Regresi Data Panel

Dependent Variable: LOG(Y/X2)
Method: Panel Least Squares
Date: 05/05/18 Time: 12:12
Sample: 2010 2016
Periods included: 7
Cross-sections included: 19
Total panel (unbalanced) observations: 123

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	41.17587	5.065643	8.128459	0.0000
LOG(X1)	-1.582594	0.434999	-3.638154	0.0004
LOG(X2)	-0.993056	0.163097	-6.088741	0.0000
LOG(X3)	-0.220802	0.085004	-2.597541	0.0106
R-squared	0.424413	Mean dependent var		11.31723
Adjusted R-squared	0.409902	S.D. dependent var		1.505685
S.E. of regression	1.156634	Akaike info criterion		3.160886
Sum squared resid	159.1986	Schwarz criterion		3.252339
Log likelihood	-190.3945	Hannan-Quinn criter.		3.198034
F-statistic	29.24844	Durbin-Watson stat		1.395129
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sehingga didapatkan persamaan akhir model regresi data panel (*Pooled Least Square*) Sebagai berikut:

$$\text{LogY/X2} = 41.18 - 1.58\text{Log X1}_{it} - 0.99\text{Log X2}_{it} - 0.22\text{LogX3}_{it} \quad (3)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Sumatera Barat

Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan yang dilihat dari produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (X_1) berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran total pemerintah daerah perkapita yang dilihat dari realisasi pengeluaran pembiayaan daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dari hasil estimasi diperoleh koefisien regresi variabel pendapatan (X_1) terhadap pengeluaran pemerintah daerah (Y) sebesar -1.582594 artinya ketika terjadi kenaikan pendapatan (X_1) sebesar 1% maka akan mengakibatkan berkurangnya pengeluaran pemerintah sebesar -1.582594 hal ini tidak sesuai dengan teori Wagner, karena daerah di Sumatera Barat telah memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik sehingga pengeluaran pemerintah menjadi

berkurang. Hal ini, dapat terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian misalnya pada kota payakumbuh memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan nilai 6,45 tetapi pengeluaran pemerintah daerah perkapita -28,89.

Teori yang dikemukakan oleh wagner tentang pengeluaran pemerintah ini menyebutkan bahwa makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul di dalam masyarakat.

Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiartiningsih dengan penelitian yang berjudul "*Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia*" dari hasil penelitian di dapat bahwa pengaruh pendapatan perkapita terhadap pengeluaran pemerintah di Indonesia adalah positif dengan kontribusi rendah.

Pengaruh jumlah penduduk terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Sumatera Barat

Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk wilayah (X2) berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran total pemerintah daerah perkapita. Dari hasil estimasi diperoleh koefisien regresi variabel jumlah penduduk (X2) terhadap pengeluaran pemerintah daerah sebesar -0.993056 artinya ketika terjadi kenaikan jumlah penduduk (X2) sebesar 1% maka akan mengakibatkan berkurangnya pengeluaran pemerintah sebesar -0.003056.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkholis (2007) yang mengatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap pengeluaran pemerintah daerah. Apabila jumlah penduduk suatu daerah bertambah maka pengeluaran pemerintah daerah perkapita akan mengalami penurunan. Dimana peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan faktor pembagi pengeluaran pemerintah daerah menjadi meningkat yang menyebabkan pengeluaran pemerintah menurun.

Jumlah penduduk merupakan indikator yang paling sering digunakan dan paling kuat dalam menentukan pertumbuhan daerah. Hal ini terkait dengan penyediaan pelayanan terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu, kenaikan jumlah penduduk harus diiringi dengan peningkatan pengeluaran pemerintah daerah, terutama untuk penyediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Pengaruh luas wilayah terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Sumatera Barat

Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa luas wilayah (X3) berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran total pemerintah daerah perkapita. Dari hasil estimasi diperoleh koefisien regresi variabel luas wilayah (X3) terhadap pengeluaran pemerintah daerah (Y) sebesar -0.220802

artinya ketika terjadi kenaikan luas wilayah (X3) sebesar 1% maka akan mengakibatkan berkurangnya pengeluaran pemerintah sebesar -0.220802.

Hal ini sesuai dengan penelitian Nazara dan Nurkholis (2007) yang menyatakan bahwa luas wilayah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran pemerintah dimana, hubungan antara luas wilayah dan pengeluaran pemerintah tidak bersifat linear, cenderung seperti kurva U terbalik. Hal ini berarti bahwa semakin luas wilayah Kabupaten atau Kota maka pada awalnya pengeluaran pemerintah akan meningkat. Namun pada satu titik tertentu semakin luasnya wilayah dapat mengakibatkan berkurangnya pengeluaran pemerintah.

Luas wilayah juga merupakan faktor penting untuk melihat besaran pengeluaran daerah yang harus dikeluarkan. Karena dengan memperhatikan luas wilayah pemerintah dapat melihat kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana dimana semakin besar luas wilayah suatu daerah maka semakin besar pula sarana prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar terciptanya pelayanan publik yang baik.

SIMPULAN

Pengaruh variabel pendapatan (X1) terhadap pengeluaran pemerintah daerah (Y) adalah negatif signifikan dengan koefisien regresi -1.582594 dengan probabilitas 0.0004. Pengaruh variabel Jumlah penduduk (X2) terhadap pengeluaran pemerintah daerah (Y) adalah negatif signifikan dengan koefisien regresi sebesar -0.993056 dengan probabilitas 0.0000. Pengaruh variabel luas wilayah (X3) terhadap pengeluaran pemerintah daerah (Y) adalah negatif signifikan dengan koefisien regresi -0.220802 dengan probabilitas 0.0106. Pengaruh pendapatan, jumlah penduduk, dan luas wilayah dengan probabilitas 0.000000 dengan koefisien determinasi atau R^2 Sebesar 0.424413.

Pengeluaran pemerintah adalah faktor pendukung pembangunan daerah, karena semakin besar pengeluaran pemerintah maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkat apabila pendapatan daerah tersebut mengalami peningkatan oleh karena itu pemerintah juga harus memperhatikan sasaran kebijakan dan mengoptimalkan pendapatan daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik (2016), *PDRB Kabupaten/kota Sumatera Barat tahun 2010-2016*, Padang, BPS.
- Badan Pusat Statistik (2016), *Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten/kota Sumatera Barat tahun 2010-2016*, Padang, BPS.
- Badan Pusat Statistik (2016), *Jumlah penduduk Kabupaten/kota Sumatera Barat tahun 2010-2016*, Padang, BPS.
- Badan Pusat Statistik (2016), *Luas wilayah Kabupaten/kota Sumatera Barat tahun 2010-2016*, Padang, BPS.
- Bendesa, Danawati,dkk (2016), *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Ivestasi Terhadap Kesempatan Kerj, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan*

Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.7(2016):2123-3067

Mangkoesebroto, Guritno. 2011. *Ekonomi Publik*. BPF. Yogyakarta.

Margaretha, Lillyani O. 2014. *Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari*. Tahun 1990-2012. Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Papua : Manokwari

Nazara, S. Dan Nurkholis. (2007). *Ukuran Optimal Pemerintah Daerah di Indonesia : Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Era Desentralisasi*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. VII No. 02,2007 Januari, 129-157.